

**PROPOSAL
PENELITIAN**



**PENGARUH REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**Witra Maison, SE. M.Si /1022026304/ Ketua
Juita Sukraini, SE. M.Si / 1017116201/Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
SEPTEMBER 2020**

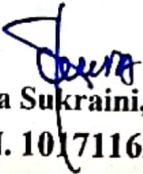
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Riviui Laporan Keuangan Dan Penerapan Standar Akuntansui Pemerintah Berbasis Akruai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok)


Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Nomor HP : 081363310206
Alamat surel (e-mail) : witramaison.02@gmail.com
Anggota Tim
Nama Lengkap : juita Sukraini, SE. MSi
NIDN : 1017116201
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2020/2021
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 7.500.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 7.500.000,-

Solok, 13 September 2020


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


(Juita Sukraini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,


(Witra Maison, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN. 1019017402

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....	1
2. KAJIAN PUSTAKA.....	8
3. METODOLOGI PENELITIAN	12
4. JADWAL	20
5. DAFTAR PUSTAKA	21

LAMPIRAN

PENGARUH REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

1.1 Latar Belakang

Tonggak awal otonomi daerah diawali pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut saat ini telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mengarahkan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melakukan urusan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan diatur dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD.

Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebagai informasi, laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipandang sebagai alat pertanggungjawaban, alat pengendalian, alat mengkomunikasikan hasil kepada struktur yang lebih tinggi, alat untuk menilai kinerja, dan alat untuk referensi dimasa yang akan datang. Olehkarena itu, pemerintah pusat/daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah umumnya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangan yaitu perangkat regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual belum sepenuhnya mendukung SAP berbasis akrual dan diimplementasikan, analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, aset dan teknologi informasi serta Inspektorat selaku pereviu LKPD belum memadai, menyangkut analisis kebutuhan maupun optimalisasi SDM, dan dari aspek pengelolaan teknologi, pemerintah daerah belum melakukan analisis sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk implementasi SAP berbasis akrual, sistem aplikasi yang dimiliki belum sesuai kebutuhan untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual, dan pemerintah daerah belum membuat rencana dan melakukan evaluasi periodik atas sistem aplikasi tersebut. (Kalumata, 2017)

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas pada pemerintah daerah perlu adanya atas reviu laporan keuangan oleh pihak terkait yaitu Inspektorat. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Salah satu kegiatan pengawasan internal yaitu melalui kegiatan reviu atas LKPD. Pada penelitian (Kalumata, 2017) pada kabupatenkota di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa reviu laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh proses reviu LKPD oleh Inspektorat.

Selain itu penelitian (Hadi & Darwanis, 2017) menunjukkan bahwa audit internal yang dilaksanakan oleh auditor berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Kabupaten Jeneponto. Auditor internal menjalankan fungsinya menelaah informasi laporan keuangan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas. Kegiatan audit internal termasuk di dalamnya reviu laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2008 bahwa reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan ruang lingkup meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan SPI dan kesesuaian dengan SAP. Aparat pengawas intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat melakukan reviu dengan berpedoman pada prosedur reviu atas LKPD yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Melalui rangkaian prosedur reviu diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP.

Selain Reviu laporan keuangan dalam mewujudkan laporan keuangan berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. . Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi. Jika

pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sehingga, tinggi-rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan (Kaertika & Safitri, 2017).

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Reviu laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Apakah Reviu laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Untuk mengetahui pengaruh reviu laporan keuangan terhadap kualitas laporan.
- 2 Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh reviu laporan keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual secara simultan.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Menambah pengetahuan penulis tentang reviu laporan keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini Kepala Daerah, Kepala SKPD dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Memberi masukan kepada para Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah dalam penguatan peran APIP

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”. Sedangkan Arfianti (2011) berpendapat bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah asersipihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan padanya.

Laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota merupakan laporan keuangan yang disusun dengan dasar laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan keuangan OPD merupakan hasil pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Erlina dkk, 2015: 19).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2.1.1 Defenisi Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Menurut (Maulana, 2017) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah sesuai kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber daya (Erlina dkk, 2015: 20). Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.3 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Masyarakat
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4. Pemerintah

Ada 4 (empat) kebutuhan pengguna terhadap laporan keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Financial viability, yaitu menilai kemampuan keuangan pemerintah untuk tetap survive dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- b. Fiscal compliance, yaitu untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Management performance, yaitu menilai kemampuan manajemen (pemerintah) untuk menggunakan dana yang ada sebijak mungkin.
- d. Cost of service provided, yaitu untuk membandingkan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang.

Oleh karena itu, pemerintah wajib menyajikan informasi keuangan secara terstruktur, sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

2.1.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan negara, oleh karena itu komponen yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan. PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual dimana pengakuan didasarkan pada munculnya hak dan kewajiban, bukan hanya berdasarkan arus kas.

Setelah berlakunya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
 - 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - 4) Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah
- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 63 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Pelaporan Finansial

a. Neraca

Pada PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari:

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tidak lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2) Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek yaitu utang yang dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dan kewajiban jangka panjang yaitu utang yang dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Laporan Operasional (LO)

PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 menyatakan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam laporan operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer merupakan hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas pada tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 menyajikan sekurang-kurangnya:

- 1) Ekuitas awal

- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
 - 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
 - 4) Ekuitas akhir
- d. Laporan Arus Kas

PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

2.2 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian reviu laporan keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. (Agus Prasetyo, Sifrid S Pangemanan, 2011)

Terdapat beberapa pengertian reviu yaitu berdasarkan :

- a. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) : reviu adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER44/PB/2006 reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Reviu laporan keuangan sangat berbeda dengan audit laporan keuangan dimana dalam audit seorang auditor harus memperoleh keyakinan yang tinggi bahwa laporan keuangan adalah bebas dari salah saji yang material. Reviu hanya memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi. Reviu tidak membutuhkan pemahaman

mendalam tentang pengendalian internal entitas, menilai risiko kecurangan, pengujian catatan dan bukti akuntansi sampai kepada dokumen sumber, atau prosedur lain yang biasanya dilakukan dalam audit (AR Section 60, SSARS No 19, AICPA).

2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan harapan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*). Dalam PP No. 71 tahun 2010 pasal 1ayat (3) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yangditerapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).

SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

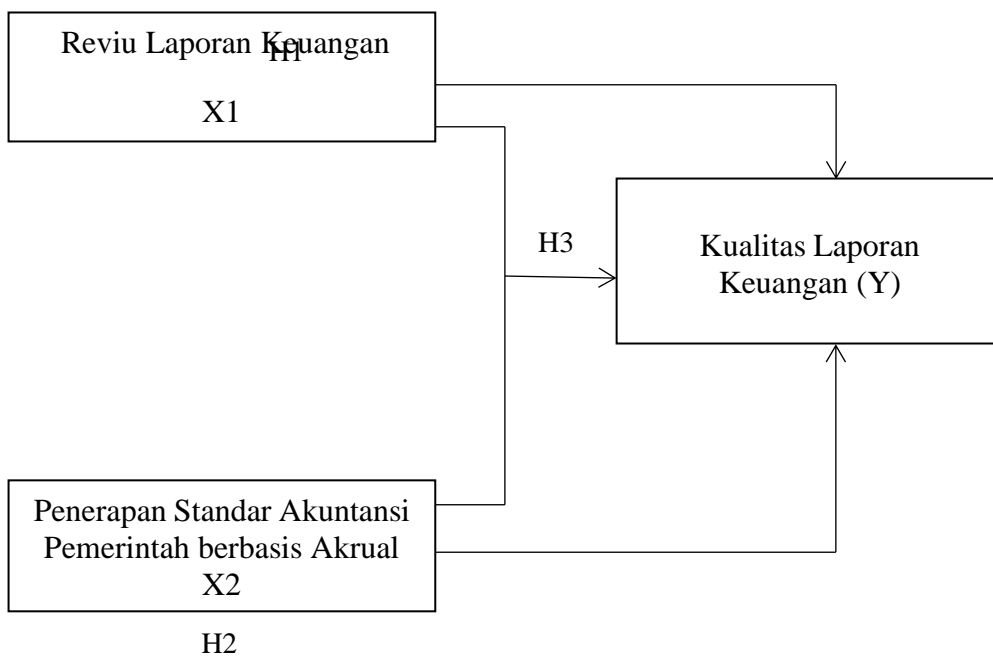
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berisi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. SAP ini mengakui pendapatan, beban, aset,utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual. Sedangkanpengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam SAP ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan operasional, laporan perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan laporan perubahan ekuitas.

2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini

akan diteliti tentang pengaruh reviu laporan keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh reviu laporan keuangan (X1), dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (X2). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y). Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang berasal dari kata hipo berarti kurang atau lemah dan tesis atau thesis yang berarti teori yang disajikan sebagai bukti. Dalam pembicaraan ini hipo diartikan lemah dan tesis diartikan teori, proposisi atau pernyataan. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesis telah terbukti kebenarannya, ia akan berubah namanya disebut tesis, jadi merupakan teori. Hipotesis dapat diterima tetapi dapat ditolak, diterima apabila bahan-bahan penelitian membenarkan kenyataan dan ditolak apabila menyangkal (menolak) kenyataan (Cholid Narbuko & H. Abu Achmadi, 2010; 28)

2.2.1 Pengaruh reviu laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 menjelaskan reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Bedanya dengan audit, reviu tidak memberikan opini dan tidak menguji kebenaran substansi dokumen, (Simpem, 2015).

Reviu yang berkualitas yang sesuai dengan Standar Reviu, akan menghasilkan rekomendasi yang tepat sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Namun demikian, masih terdapat banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan reviu dilaksanakan oleh auditor APIP, yang tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan (Dadang Suwanda, 2017). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Reviu laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.6. 2 Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu dapat memenuhi kualitas yang dapat dikehendaki yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemerintah perlu untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan yang baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Menurut penelitian (Kiranayanti & Erawati, 2016) Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah Kabupaten Bantul dengan. Hal ini menggambarkan bahwa SKPD di Kabupaten Bantul belum menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dalam membuat laporan keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.6.3 Pengaruh revid laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Revid menurut Standar Profesional Akuntan Publik yang dikutip dari Siwy (2016) adalah prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Revid tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, pengujian atas catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Berbagai aturan perundangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan telah diterbitkan pemerintah. Namun pemborosan penggunaan dana masih terjadi. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu dengan mengadakan revid dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah pada setiap OPD. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Revid laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode deksriptif asosiatif. Penelitian asosiatif adalah suatu pernyataan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dan antara dua variabel atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Menurut Sugiyono (2010: 137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang berisikan daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

Penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari. Sedangkan analisis dilakukan melakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sebagian besar tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan laporan skripsi ini penulis memperoleh data primer. Data ini peneliti peroleh dengan memberikan kuesioner yang bersifat tertutup dengan menggunakan *Skala Likert*. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam pengelompokkan data primer dengan cara pembagian kuesioner, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Populasi dan Teknik Sampling

Berdasarkan penjelasan diatas dan judul yang diambil yaitu Pengaruh Reviu Laporan Keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2012). Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2012) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kasubag Keuangan dan Bendahara di masing-masing OPD di Kabupaten Solok.

3.5 Variabel Penelitian, Pengukuran Instrumen Penelitian dan Defenisi

Variabel Operasional

Dalam penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Adapun penjelasan dari variabel independen menurut Sugiyono (2012:59) adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

1. Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel Independen (bebas) menurut Sugiyono (2013:39) adalah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

- a. Reviu laporan keuangan (X1)
- b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI (X2)

2. Variabel Dependen (variabel terikat)

Variabel dependen dalam penelitian yang penulis ambil adalah kualitas laporan keuangan (Y). Definisi laporan keuangan Pemerintah

Daerah menurut (Hadi & Darwanis, 2017) adalah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang berisi suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh OPD dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan oleh atasannya. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan dan menunjukkan kondisi keuangan suatu instansi pada suatu waktu tertentu.

3.5.2 Pengukuran Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2013:146) instrumen penelitian adalah Suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner metode tertutup, dimana kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban.
2. Indikator-indikator untuk variabel tersebut dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah pernyataan sehingga diperoleh data kualitatif.

Data ini akan diubah menjadi bentuk kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik. Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah teknik skala *Likert*. Penggunaan skala *Likert* menurut Sugiyono (2013:132) adalah “Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.

3.5.3 Defenisi Operasional Penelitian

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar.

Dalam penelitian terdapat variabel-variabel yang bersifat saling mempengaruhi. Untuk memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan definisi operasional variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Reviu Laporan Keuangan (X1)	Pengertian Reviu laporan keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Agus Prasetyo, Sifrid S Pangemanan, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Reviu 2. Tekanan Waktu 3. Kualitas Reviu 4. Anggaran Dana Reviu (Komang Widayarni, 2014) 	Likert
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X2)	SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Penyajian Laporan Arus Kas 4. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan 5. Pencatatan Akuntansi Persediaan 6. Pengakuan atas akuntansi investasi 7. Pencatatan Akuntansi Aset Tetap 8. Pengungkapan Akuntansi Kontruksi Dalam 	Likert

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
	<p>pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010). SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).</p>	<p>Pengerjaan 9. Pencatatan Akuntansi Kewajiban 10. Pencatatan Koreksi Kesalahan 11. Laporan Keuangan Konsolidasi (Ni Made Sudiarianti, dkk, 2015)</p>	
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	<p>Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. (Defitri, 2016)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dipahami 4. Dapat dibandingkan (Pujanira & Taman, 2017) 	Likert

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Instrumen

Uji instrumen merupakan salah satu ciri penting dalam penelitian karena sebuah pembuatan skala atau alat ukur yang dibuat oleh peneliti untuk mengukur variabelnya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas Zulganef (2013;80). Uji Instrumen terdiri dari :

1. Uji Validitas

Uji validitas menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. Menurut Sugiyono (2012:121) menyatakan bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mencari nilai validitas di sebuah item mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2012:133) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Jika $|r \text{ hitung}| \geq |r \text{ tabel}|$ maka pengujian dinyatakan valid.
- b. Jika $|r \text{ hitung}| \leq |r \text{ tabel}|$ maka pengujian dinyatakan tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menyatakan bahwa apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sugiyono (2012:122) reliabilitas adalah derajat konsistensi/ keajegan data dalam interval waktu tertentu. Berdasarkan pengertian diatas maka reabilitas dapat dikemukakan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dankekonsistenan. Pengujian reliabilitas kuesioner pada penelitian ini penulis menggunakan metode *Alpha Cronbach*. Adapun kriteria untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian ini yang merujuk kepada pendapat (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2007:42) "Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60."

3. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis ini dilakukan teknik *moderated regression analysis*. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 25.0 uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi linear berganda. Dalam uji asumsi klasik ini meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah penyebaran data hasil penelitian terdistribusikan secara normal atau tidak. Mode regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal yang akan disajikan dalam grafik P-Plot. Dimana standar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2013;110) yaitu :

- a. Jika data menyebar sekitar garis diagonal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem multikolinieritas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2012:234). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wiyono (2011; 160) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dalam residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun pedoman yang digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar scatterplots dengan ketentuan:

Tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas jika :

- a. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka
- b. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali.

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan alat bantu pengolahan SPSS. Analisis regresi linear berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua, Sugiyono (2014:127).

Karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas yang akan diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat, maka proses analisis regresi yang dilakukan adalah menggunakan analisis regresi berganda.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kualitas Laporan Keuangan
A	=	Koefisien konstanta
b ₁ , b ₂	=	Koefisien Regresi
X ₁	=	Reviu laporan keuangan
X ₂	=	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
E	=	Error

3.6.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial (Sugiyono, 2014:131).

1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2013:98) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan membandingkan nilai t hitung dengan t_{tabel} dengan signifikan $\alpha = 5\%$ untuk *degree of freedom* (df) = n-k, dimana n adalah jumlah responden penelitian dan k jumlah variabel independent dengan ketentuan :

- Apabila $|t_{hitung}| \geq |t_{tabel}|$ maka dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)
- Apabila $|t_{hitung}| \leq |t_{tabel}|$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen di dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:99). Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ untuk *degree of freedom* (df) = n-k-1, dimana n adalah jumlah responden penelitian dan k jumlah variabel independent dengan kriteria:

- Jika nilai $|F_{hitung}| \geq F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- Jika nilai $|F_{hitung}| \leq F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara

bersama-sama variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 ($\alpha=5\%$) dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Nanang Martono, 2014;171) adalah :

- a. Jika nilai signifikan $\text{sig} \leq 0,05$ maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- b. Sebaliknya jika signifikan $\text{sig} \geq 0,05$ maka hipotesis tidak teruji yang berarti variabel independen (X) secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).

3.6.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2013:101) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas kita menggunakan *R square*, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua variabel maka akan lebih baik menggunakan *adjusted R square* yang nilainya selalu lebih kecil dari *R square*, Ghazali, (2013;102). Dalam penelitian ini pengujian koefisien determinasi menggunakan *R square*, karena variabel bebas dalam penelitian ini hanya dua.

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Penentuan topik penelitian													
2.	Perumusan masalah penelitian													
3.	Penulisan Proposal													
4.	Survey Awal													
5.	Menvalidasi Instrumen													
6.	Collected Data													
7.	Analisis Data													
8.	Pengujian Hipotesis													
9.	Penulisan laporan akhir													

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Baridwan, Zaki. 2015. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuntadi, C. 2012. *Auditor dan Pengamat Kebijakan Publik*. Tangerang: Seminar dan Diskusi Panel Reviu Laporan Pemerintah Pusat / Daerah.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : Andi.
- Notoatmodjo, S. 2014. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1,No.1.Hal: 2337-3806..
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro.Semarang*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wilkinson, W.J., Cerullo, M.J., Raval, V. dan Wong-On-Wing, B. (2015). *Accounting information systems: essential concepts and applications*. Fourth Edition. John Wiley Sons. Inc.
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. (2010). Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variable intervening pengendalian intern akuntansi (Studi empiris di Pemda Subosukawonosraten Kota Semarang. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Dadang Suwanda. (2017). *Reviu Laporan Keuangan*.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi UniversitasNegeri Padang*, 1–25.
- Hadi, & Darwanis. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia*,

- Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan*, 10(2), 81–94.
- Kaertika, & Safitri, H. (2017). *PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*. 52–60.
- Kalumata, M. C. ., Ilat, V., & Warongan, J. D. . (2016). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA*. 17, 2015.
- Kiranayanti, I. ayu enny, & Erawati, N. made adi. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290–1318.
- Maulana, M. S. R. (2017). ANALISIS ATAS REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Rofika, R., Kamaliah, K., & Rahmadani, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Bara. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34108.
- Studi, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan*, 10(2), 81–94.
- Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *Jurnal E-Proceeding Of Management*, 6(1), 660–667.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

Surat Tugas

No. 13 ST-P/LP3M-UMMY/IX-2020

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk I/ III d
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul **“Pengaruh Riviur Laporan Keuangan Dan Penerapan Standar Akuntansui Pemerintah Berbasis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok)”** pada Tahun Akademik 2020/2021

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 13 September 2020
Kepala LP3M UMMY

DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.
NIDN. 1019017402



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Pangkat/Golongan : Penata TK I/ III d
Jabatan Fungsional : Lektor

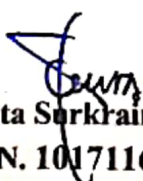
Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Rivi Laporan Keuangan Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok)**, yang dilaksanakan pada tahun akademik 2020/2021 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UMMY.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 13 September 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


(Juita Sarkrainsi, SE.M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,


(Witra Maison, SE. MSi)
NIDN. 1017116201

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN. 1019017402